

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

2021 - 2024



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra Perangkat Daerah menggambarkan tujuan Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Tahun 2019-2024.

Biro yang berkedudukan sebagai unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bertugas untuk membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial yang berpedoman pada kebijakan nasional dan daerah, berubah nomenklatur, struktur dan fungsi menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2021. Dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan, Biro Kesejahteraan Rakyat berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan Nawa Bhakti Satya dan Program Prioritas Gubernur serta Wakil Gubernur pada RPJMD Provinsi Jawa Timur. Biro Kesejahteraan Rakyat berperan pada Jatim Berkah dan mendukung tercapainya target Indeks Kepedulian Sosial sebagai salah satu Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penyesuaian serta perubahan Rencana Strategis pada Biro Kesejahteraan Rakyat dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat Perkembangan Kebijakan Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terjadi perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi
3. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Adanya pandemi covid-19 yang menjadi bencana nasional dan merubah arah prioritas pembangunan daerah, sehingga berdampak pada Refocusing Anggaran serta Perubahan Kondisi Makro Ekonomi, maka perlu adanya penyesuaian Target Kinerja Pembangunan melalui Dokumen Perubahan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019-2024

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor x Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor x Seri x, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor xx);
12. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penyesuaian dokumen perencanaan pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial yang berubah menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020
2. Dengan adanya perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi pada Biro, maka perlu adanya penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator dan target pada dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra diperlukan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Biro Kesejahteraan Rakyat
2. Dokumen Perubahan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat akan menggambarkan peran dan tugas Biro Kesejahteraan Rakyat dalam

mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

3. Dengan adanya berbagai perubahan kebijakan Nasional dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di era new normal pandemi covid-19, maka Perubahan Renstra ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan pencapaian tujuan Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat
2. Sumber Daya Biro Kesejahteraan Rakyat
3. Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO KESEJAHTERERAAN RAKYAT

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas untuk membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar

Dalam menjalankan tugas tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Susunan organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

b. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakandaerah di bidang bina kehidupan spiritual, sarana dan prasarana spiritual, serta kelembagaan bina spiritual.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Bina Mental Spiritual menjalankan fungsi :

- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina kehidupan spiritual, sarana dan prasarana spiritual, serta kelembagaan bina spiritual;
 - penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina kehidupan spiritual, sarana dan prasarana spiritual, serta kelembagaan bina spiritual;
 - penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina kehidupan spiritual, sarana dan prasarana spiritual, serta kelembagaan bina spiritual; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
- c. Kepala Bagian Non Pelayanan Dasar, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan tata usaha.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Non Pelayanan Dasar menjalankan fungsi :

- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan tata usaha;
- penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan tata usaha;

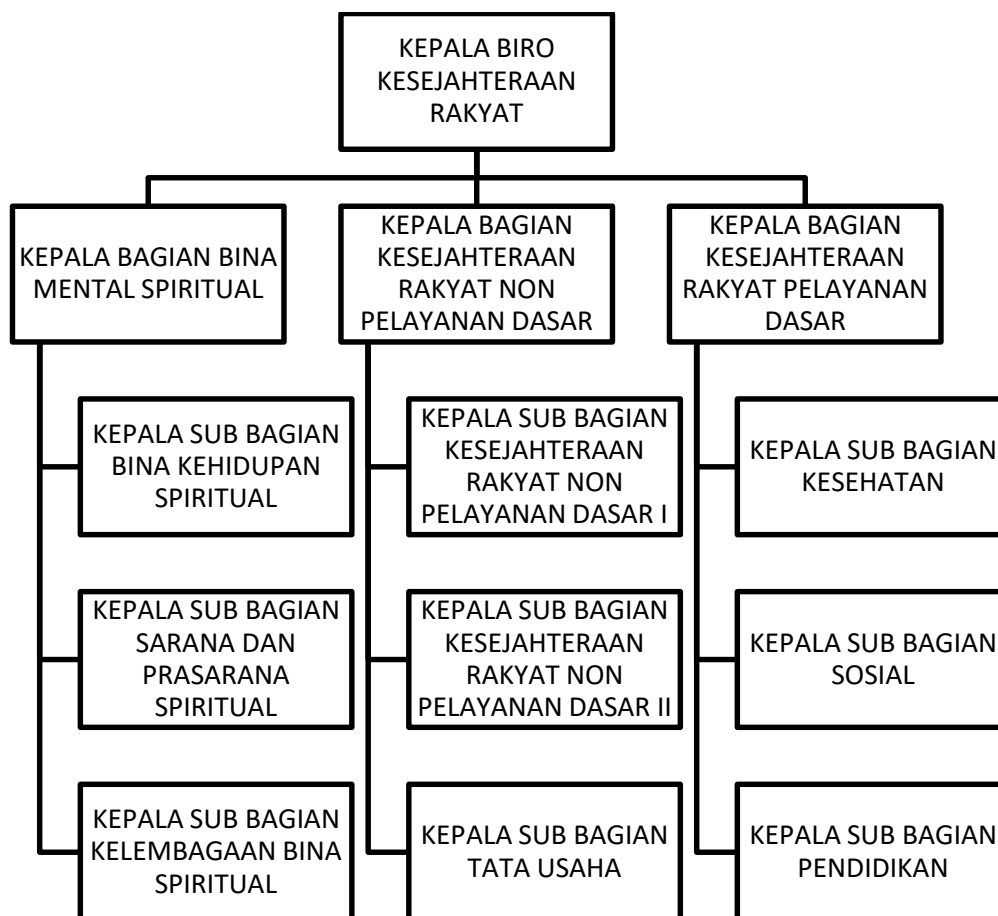
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan tata usaha; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro
- d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

TABEL 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



22. Sumber Daya Perangkat Daerah

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai sumber daya yang mendukung kinerja Biro sehingga bisa mencapai target dan tujuan yang diinginkan. Sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Biro.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompetensi merupakan sumberdaya yang paling menentukan keberhasilan dalam pencapaian kinerja organisasi. Kualitas ASN yang dimiliki dapat tergambar dari pendidikan formal dan diklat yang pernah diikuti hingga Januari 2021, sebagaimana pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan

NO	GOL	J A B A T A N				JUMLAH	KET
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF		
1.	IV	1	3	5	6	15	
2.	III	-	-	6	41	47	
3.	II	-	-	-	32	32	
4.	I	-	-	-	9	9	
5.	PTT-PK	-	-	-	34	34	
	JUMLAH					137	

Tabel 3
Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Jabatan

NO	PENDIDIKAN	J A B A T A N				JUMLAH	KET
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF		
1.	S-3	1	-	-	-	1	
2.	S-2	-	3	9	16	28	
3.	S-1 / D-4	-	-	2	44	46	
5.	SM / D-3	-	-	-	-	0	
6.	D-2 / D-1	-	-	-	-	0	
7.	SLTA	-	-	-	26	26	
8.	SLTP	-	-	-	-	0	
9.	SD	-	-	-	2	2	
	JUMLAH					103	

Tabel 4
Data Pegawai berdasarkan Kompetensi sesuai dengan Diklat yang diikuti

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai yang mengikuti	Ket
1	Diklat Pim II	-	
2	Diklat Pim III	5	
3	Diklat Pim IV	10	
4	41 Jenis Diklat Teknis	14	

b. Sarana dan Prasarana Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan asset gedung Sekretariat Daerah Jawa Timur yang dikelola oleh Biro Umum. Sedangkan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, utamanya di Islamic Center Surabaya dibebankan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan berkonsultasi pada Biro Umum dan BPKAD Provinsi Jawa Timur. Adapun sarana dan prasarana yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Alat-alat besar	31	Buah/set
2.	Alat angkutan darat bermotor	29	Buah
3.	Alat bengkel dan alat ukur	10	Buah
4.	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan		Buah
5.	Alat kantor dan rumah tangga	8.026	Buah
6.	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat		Buah
7.	Alat studio dan komunikasi	296	Buah
8.	Bangunan gedung	9	Buah
9.	Buku dan perpustakaan	9.897	Buah/set
10.	Barang bercorak kebudayaan	41	Buah/set

23. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat turut mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah utamanya dalam pelayanan administrasi dan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan berperan dalam upaya peningkatan Indeks Kepedulian Sosial masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka Biro Kesejahteraan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui

rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

Tahun 2021 menjadi tahun perubahan, dimana terdapat perubahan nomenklatur dan indikator berdasarkan kebijakan nasional. Pada tahun 2019 yang merupakan tahun transisi RPJMD dikarenakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan masih berdasarkan pada Renstra 2014-2019. Sedangkan indikator pada tahun 2020, berdasarkan kepada Renstra 2019-2024, sehingga indikator pada tiga tahun berturut-turut (2019 - 2021) tidak sama dan berkembang menyesuaikan ketentuan di atasnya.

Secara garis besar maka kinerja pelayanan yang dicapai selama 2 tahun terakhir (2019-2020) adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Terlaksananya koordinasi dengan instansi atau OPD mitra terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Terlaksananya dukungan layanan administrasi bantuan sosial dan bantuan hibah melalui kegiatan di Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

**Tabel T-C.23.2019-2020 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-		Rasio capaian pada tahun ke- (%)		Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	
1.	Persentase Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	-	-	-	100 %	-	-	-	-	92,6 %				
2.	Persentase Kebijakan di Bidang Pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang ditindaklanjuti	-	-	-	100 %	-	-	-	-	87,7 %				
3	Persentase kebijakan di Bidang Tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti	-	-	-	100 %	-	-	-	-	97,2 %				
4	Persentase kebijakan di Bidang Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti	-	-	-	100 %	-	-	-	-	86,6 %				
5	Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	-	-	-	100 %	93 %	-	-	-	96,4 %				
6.	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang mental kerohanian	-	-	-	-	12	-	-	-	-	7	-	-	-
7.	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	-	-	-	-	11	-	-	-	-	9	-	-	-
8.	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	-	-	-	18	-	-	-	-	8	-	-	-
9.	Persentase capaian kinerja pelayanan kesekretariatan	-	-	-	-	80 %	-	-	-	-	82 %	-	-	-
10	Jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	-	-	-	-	13	-	-	-	-	6	-	-	-

**Tabel T-C.23. 2021-2024 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-				Realisasi capaian tahun ke-		Rasio capaian pada tahun ke- (%)	Keterangan
					2021	2022	2023	2024	2020	2021		
1.	Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	-	-	-	85 %	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	-	-	-	85 %	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (dalam ribuan)

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2024	2019	2020	2021	2022	2024	2019	2020	2021	2022	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.011.175.795	-	-	-	-	2.951.472.649	-	-	-	-	98,02	-					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	664.525.000	-	-	-	-	650.962.260	-	-	-	-	93,46	-					
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	577.850.000	-	-	-	-	441.213.580	-	-	-	-	76,35	-					
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	146.150.000	-	-	-	-	86.696.000	-	-	-	-	59,32	-					
Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kerohanian	8.227.480.000	-	-	-	-	7.885.110.384	-	-	-	-	95,84	-					
Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	8.513.950.000	-	-	-	-	8.287.244.986	-	-	-	-	97,34	-					
Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan	13.152.443.550	-	-	-	-	12.855.365.004	-	-	-	-	97,74	-					

Perlindungan Anak																	
Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4.121.285.000	-	-	-	-	3.515.719.751	-	-	-	-	85,31	-					
Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	12.512.600.000	-	-	-	-	12.027.588.659	-	-	-	-	96,12	-					
Program Pelayanan Kesekretariatan	-	9.166.103.300	-	-	-	-	8.422.451.645	-	-	-	-	91,89					
Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	-	9.799.638.600	-	-	-	-	9.302.740.142	-	-	-	-	94,93					
Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	-	5.708.814.360	-	-	-	-	5.547.919.233	-	-	-	-	97,18					
Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	8.673.333.332	-	-	-	-	8.039.217.065	-	-	-	-	92,69					
Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	-	2.017.550.208	-	-	-	-	1.889.913.670	-	-	-	-	93,67					
Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	-	8.573.249.081	-	-	-	-	8.117.245.754	-	-	-	-	94,68					

24. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat memetakan berbagai masalah dan potensi dilingkungan Biro, maka disusunlah analisa sebagai berikut :

Tabel 5
Analisa terhadap Kekuatan, Peluang, Kelemahan serta Ancaman pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

No.	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threats</i> (Ancaman)
	a. Jumlah SDM yang cukup banyak b. Adanya keinginan untuk terus memperbaiki administrasi dan pelayanan c. Adanya asset Islamic center, sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Biro Adm. Kesra	a. Kurangnya SDM yang memahami pentingnya tugas pokok dan fungsi b. Besarnya tugas tambahan yang diberikan kepada staf (peringatan PHBN dan dukungan layanan adm. Hibah) c. Anggaran untuk penunjang tupoksi yang terbatas	a. Banyaknya Perangkat daerah yang menjadi mitra Biro Kesra bisa memberikan masukan data dan bekerjasama dalam perumusan kebijakan	a. Belum adanya dokumen perencanaan di Sekretariat Daerah yang seharusnya menjadi dasar bagi masing-masing Biro untuk menyusun dokumen perencanaan b. Adanya tumpang tindih tupoksi pada Pergub, dengan Perangkat Daerah Mitra yang juga merumuskan kebijakan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak, diperlukan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian Pemerintah diharapkan untuk berperan dalam membangun masyarakat Jawa Timur yang berkualitas melalui optimalisasi pembangunan berlandaskan pada hubungan antar manusia yang baik dengan latar belakang bina mental spiritual dan rumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Pembangunan masyarakat Jawa Timur yang berkualitas merupakan upaya kompleks yang harus ditangani secara menyeluruh. Ada banyak aspek yang perlu disentuh untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, utamanya pembangunan generasi bangsa yang menjadi investasi Jawa Timur kedepannya. Bonus demografi yang akan diterima Jawa Timur pada tahun 2019 dan 2020 menjadi salah satu peluang bagi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi jika bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik, maka keadaan ini akan menjadi ancaman karena beban pendidikan dan tenaga kerja yang semakin meningkat.

Oleh karena itu perlu adanya pendayagunaan berbagai potensi Jawa Timur, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, berakhlak, dan beretika. Dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat akan berupaya maksimal untuk menghasilkan kebijakan dibidang Bina mental spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang mampu mendukung visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Timur dalam RPJMD 2019-2023.

Beberapa permasalahan dan kondisi yang ada dan harus ditangani adalah sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024, Biro Kesejahteraan Rakyat

berperan dalam beberapa sasaran dan program icon. Sebagai unsur staf yang memiliki posisi strategis untuk merumuskan kebijakan lintas sektor, Biro Kesejahteraan Rakyat dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis di Jawa Timur yang bisa digambarkan sebagai berikut :

- Dimana kita pahami bersama bahwa agama berperan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hubungan antar manusia, yang dinilai dengan indeks kesalehan sosial. Karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan, sikap percaya, toleransi, tolong menolong dan partisipasi dalam aksi bersama yang akan meningkatkan keharmonisan sosial. Hubungan toleransi antar masyarakat Jawa Timur sangat baik selama tahun 2020, dimana tidak terjadi konflik antar umat beragama maupun golongan. Meskipun sempat terjadi keresahan di masyarakat pada masa awal pandemi covid-19, terkait protokol kesehatan di tempat peribadatan yang dianggap sebagian kelompok masyarakat tidak sesuai aturan Agama.
- Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren yang besar, yaitu 4.452 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 564.299 orang atau setara dengan 2,4% dari jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) Jawa Timur. Dengan demikian pondok pesantren memberikan warna yang penting dalam perkembangan keagamaan di Jawa Timur, dan sebagaimana kita mengerti bahwa perkembangan agama di Jawa Timur membawa dampak yang besar bagi pembangunan. Namun masih banyak pondok pesantren di Jawa Timur yang belum memberikan bekal yang utuh bagi santrinya. Kurangnya pendidikan formal di pondok pesantren dan pendidikan keterampilan vokasional yang diajarkan di pesantren, menyebabkan tamatan pondok pesantren memiliki ilmu yang terbatas pada ilmu agama saja.
- Di beberapa Kabupaten di Jawa Timur, masih ada budaya pernikahan dini yang membawa dampak kurang baik bagi kesehatan Ibu muda dan anak, sehingga dapat mempengaruhi nilai AKI, AKB dan balita stunting di Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan belum adanya rumusan kebijakan yang bersifat komprehensif tentang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak yang nantinya akan berdampak kepada ketahanan dan kesehatan keluarga.

- Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan keagamaan dengan kualitas tenaga pengajar yang masih sangat terbatas, sedangkan lembaga tersebut menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan pendidikan kepada anak-anak sekitar tanpa didukung pendidikan formal lainnya. Dengan kualitas pengajar yang terbatas dibidang agama, dapat menyebabkan ilmu keagamaan yang diterima anak-anak menjadi kurang komprehensif dan rentan dengan gangguan dari paham radikalisme. Disinilah arti penting dari program peningkatan kualitas Guru Madin yang dilaksanakan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial melalui LPPD, untuk meningkatkan kualitas pengajar lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Timur. Sehingga bisa memberikan makna dan nilai Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi generasi muda Jawa Timur.
- Tahun 2020 menjadi tahun pandemi covid-19, dimana mulai Bulan Maret pandemi masuk ke Indonesia dan mempengaruhi berbagai sistem yang kebijakan yang ada. Kesenjangan sosial semakin terasa dimana pada pertengahan tahun mulai banyak karyawan yang di PHK dan pengusaha harus mengubah pola bisnis menjadi daring. Dengan pola hidup new normal yang membatasi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat menjadi tantangan yang besar bagi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial untuk tetap membina mental spiritual masyarakat Jawa Timur.
- Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 pengeluaran per kapita masyarakat Jawa Timur yang disesuaikan mencapai Rp 11.600.000,- per tahun atau turun sebesar 1,18 % dari tahun 2019 sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal ini tentu berdampak pada kondisi social ekonomi masyarakat Jawa Timur, dimana terjadi kesenjangan terutama dikalangan pekerja yang bahkan harus dirumahkan sebagai kebijakan perusahaan karena adanya pandemi.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadi keresahan pada masyarakat di bidang keagamaan mengenai protokol kesehatan di tempat peribadatan ▪ Terjadi kesenjangan di bidang social ekonomi masyarakat karena adanya pandemi covid-19 	Munculnya persolaan di berbagai aspek kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Pandemi Covid-19 - Belum adanya rumusan kebijakan yang komprehensif dan lintas sektor terkait kesehatan yang memperhitungkan sosial dan ketenagakerjaan
2	Kurangnya Santri Lulusan Ponpes yang ada di Jawa Timur yang berkemampuan di pendidikan Formal dan Vokasional dan hanya menguasai pendidikan yang bersifat keagamaan.	Kurangnya SDM Tenaga Pendidik yang ada di Pondok Pesantren	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya jumlah tenaga pendidik di Ponpes - Terbatasnya Tenaga Pendidik yang menguasai pendidikan Formal dan Vokasional di Ponpes
3	Menurunnya kualitas kesehatan ibu sehingga berpengaruh terhadap kesehatan anak dengan adanya bayi stunting maupun mempengaruhi nilai AKI dan AKB yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan para penerus bangsa yang ada di wilayah Jawa Timur	Terjadinya Pernikahan dini di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Timur	belum adanya rumusan kebijakan yang bersifat komprehensif tentang lintas sektor yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Biro
4	Anak-anak kurang menerima ilmu keagamaan secara komprehensif sehingga rentan terhadap gangguan dari paham radikalisme yang berkembang di masyarakat	Lembaga Pendidikan Keagamaan menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan pendidikan kepada anak-anak sekitar tanpa didukung pendidikan formal lainnya.	Tenaga Pendidik dalam bidang keagamaan memiliki kapasitas yang terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :
“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

Misi :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Perubahan RPJMD tahun 2019 – 2024, serta mengacu kepada tugas dan fungsi yang melekat pada Biro Kesejahteraan Rakyat, serta dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Biro untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat Jawa Timur dengan meningkatkan harmoni sosial melalui rumusan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat. Beberapa upaya tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditempuh untuk anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai agama yang dipeluknya, sehingga terpenuhi hak-hak dasar mereka dalam memeluk agamanya masing-masing, dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.
3. Meningkatnya peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan masyarakat.
4. Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intra dan antar umat beragama, yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan Jawa Timur yang aman dan damai, sehingga konflik dapat dicegah dan diselesaikan, tidak meluas dan/atau terulang di daerah lain.
5. Berkurangnya perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan moralitas agama ;
6. Meningkatnya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di Bidang Bina Mental Spiritual, Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dalam hal perumusan kebijakan, koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi program kegiatan, dan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan.
7. Terlaksananya dukungan pelayanan administrasi bantuan sosial dan bantuan hibah yang dibebankan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Merujuk pada permasalahan yang dihadapi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan upaya pencapaian sasaran strategis jangka menengah dengan memperhitungkan faktor penghambat dan pendorong yang ditemui. Jika ditinjau dari visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Terpilih, maka akan ditentukan sasaran jangka menengah Biro yang mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Untuk mencapai sasaran dalam dokumen perencanaan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan oleh organisasi. Oleh karena itu akan dipetakan faktor penghambat dan pendorong dari pelaksanaan pelayanan kesejahteraan rakyat yang berkualitas serta meningkatnya kerukunan umat beragama, sesuai tujuan jangka menengah Biro Kesejahteraan Rakyat yang sejalan dengan Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Faktor-faktor tersebut tergambar melalui tabel berikut:

Visi KDH dan Wakil KDH Terpilih:				
Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong				
Tujuan Biro :				
Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar				
No	Strategi Biro Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan kebijakan lintas sektor dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menjadi mitra Biro	Terbatasnya data dan keilmuan yang dimiliki oleh staf Biro	- SDM yang dimiliki Biro belum memahami tupoksi dalam SOTK baru - Seringkali tidak dilibatkan oleh PD teknis dalam penyusunan Rumusan Kebijakan	Arahan dari pimpinan untuk selalu meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan pembinaan SDM dan keikutsertaan bimtek
2	Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di Daerah dalam rangka mengatasi permasalahan dan isu strategis yang terjadi di masyarakat	Terbatasnya jumlah SDM dikarenakan tugas tambahan terkait hibah	Waktu yang dimiliki sangat terbatas karena harus terbagi dengan pelayanan administrasi bantuan hibah yang dikerjakan Biro	Mendukung visi dan misi Gubernur dalam mengetahui hasil evaluasi kebijakan di daerah
3	Melaksanakan tugas sebagai unsur staf dari Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan dan pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat	Terbatasnya kapasitas SDM yang dimiliki Biro	Waktu dan kemampuan yang dimiliki staf sangat terbatas	Arahan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah terkait tugas pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat

34. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 disebutkan di Pasal 9 tentang kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat pelayanan. Sedangkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tidak berimplikasi secara langsung kepada kebijakan atau program yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.

35. Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan permasalahan yang berkembang di masyarakat, dengan disesuaikan pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, serta tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang akan menjadi domain pengembangan dalam sasaran program kerja dari Biro Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi :

1. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi terkait yang merupakan front liner dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melaksanakan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

Kesejahteraan Rakyat di Bidang Bina Mental Spiritual, Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dalam mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, serta kehidupan beragama sebagai tonggak dalam mengatasi permasalahan di masyarakat:
3. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama yang terpadu dengan konsep kenegaraan dan kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan, serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.
6. Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis yang sesuai dengan usia matang pernikahan, untuk meminimalkan permasalahan psikologis dan fisik dan keluarga, sehingga bisa menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
8. Meningkatkan kerukunan intra dan antar-umat beragama:
 - a. Meningkatkan upaya menjaga harmoni sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat.
 - b. Mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif, dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik.
 - c. Menyelesaikan konflik sosial yang berlatang belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, maka Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tujuan yang selaras dengan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Kesejahteraan Sosial beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2019-2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Satuan	Kinerja Tujuan/Sasaran				Target Kinerja			
					2019		2020		2021	2022	2023	2024
					target	Realisasi	target	Realisasi				
	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang mental kerohanian				12	7				
		Revitalisasi nilai-nilai budaya melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan dibidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata				11	9				
		Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di abiding tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				18	8				
		Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana				13	6				
		Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Jumlah permohonan bantuan hibah yang dilayani				3.100					

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Satuan	Kinerja Tujuan/Sasaran				Target Kinerja			
					2019		2020		2021	2022	2023	2024
					Target	realisasi	target	Realisasi				
	Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Tujuan : Indeks Kepedulian Sosial		-	-	-	-	76,98	68,20	68,22	68,24
Sasaran :			%	-	-	-	-	87 %	88 %	89 %	90 %	
1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 2. Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro								82	83	84	85	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai strategi dan arah kebijakan yang mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2020. Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat, maka dapat dilihat dari Tabel berikut

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

VISI : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong Royong			
MISI : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi dalam perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar • Terlaksananya koordinasi tentang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menjadi mitra • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar

Tabel 5.2
Tabel Nawa Bhakti Satya
Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Nawa Bhakti Satya	Program Icon	Program Nomenklatur PD	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	BHAKTI 5 : JATIM BERKAH "Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas"	Beasiswa S-1 Guru Madin	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual
		Beasiswa S-1 Mahad Aly	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual
		Beasiswa S-2 Guru Madin	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual
		Tunjangan Kehormatan Imam Masjid	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
		Tunjangan Kehormatan Huffadz	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
		Beasiswa Al Azhar Kairo, Mesir	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

5.1. Program Biro Kesejahteraan Rakyat

Sesuai dengan kebijakan nasional dan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023, maka Biro Kesejahteraan Rakyat menyusun Renstra Perubahan dengan memperhatikan perkembangan yang ada. Program yang diampu menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu :

- Program Kesejahteraan Rakyat

5.2. Program Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat.

Program Prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dimana Biro Kesejahteraan Rakyat akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- (a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- (c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (g) Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
- (h) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- (i) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

5.3. Pendanaan Indikatif Biro Kesejahteraan Rakyat.

Pendanaan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil analisis diperoleh rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai berikut

TABEL 6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

TABEL T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	2019	RP	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.0. 03. 32	Program: Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti Rangkaian kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama yang dilaksanakan	% kegiatan	95,84	2.864.831.538	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0. 03. 32. 001	Kegiatan : - Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian	o Persentase pelaksanaan kegiatan hari besar	%	96,75	1.246.029.550	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.32. 001	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan	Persentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan	%	94,07	982.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.32. 001	Peningkatan Kualitas Guru Madin	Persentase pelaksanaan kegiatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	%	96,71	531.782.500	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.33	Program : Layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	%	97,33	1.190.962.500	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.33. 001	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Pendidikan	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	%	98,20	410.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.33. 002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	%	98,37	380.962.500	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur

		3.03.33.003	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Kebudayaan	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	%	91,65	200.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
			Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang pariwisata	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	%	78,93	200.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.34	Program : Layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	95,88	2.881.600.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.34.001	Kegiatan : Penanganan tenaga kerja	o Persentase rumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditindak lanjuti	%	97,35	931.750.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
			Penanganan transmigrasi	o Jumlah rekomendasi di bidang transmigrasi	%	93,50	427.155.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.34.002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	94,19	620.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	o Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	%	98,02	3.679.547.632	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.01.019	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	o Jumlah Pegawai yang mendapat layanan	%	98,02	3.679.547.632	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		03.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	o Jumlah update database yang menunjang pelayanan administrasi di Biro Adm. Ke3.sejahteraan Sosial	%	93,46	2.234.704.202	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	o Prosentase penyediaan Peralatan dan Sarana	%	91,20	1.569.479.202	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	o Prosentase Peralatan dan Sarana yang terpelihara	%	97,96	676.225.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	o Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	%	93,45	577.850.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	%	93,45	153.550.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur

		3.03.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan Kegiatan	%	70,17	424.300.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.08	Program : Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	59,32	146.150.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Prosentase Dokumen perencanaan yang telah diselesaikan	%	24,34	20.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Prosentase Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran yang telah diselesaikan	%	9,10	20.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Prosentase pelaksanaan sistem informasi data	%	68,80	89.550.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Prosentase Laporan Keuangan yang telah diselesaikan	%	20,87	16.600.600	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.35	Program : layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	o Kebijakan di bidang, sosial, kesehatan, pengendalian, penduduk dan keluarga berencana	%	95,21	1.163.400.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
			Kegiatan : Pembinaan dan pemeliharaan rasa kebersamaan dalam bermasyarakat	o Jumlah rekomendasi di bidang penanganan bencana	%	95,6	420.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
			Penanganan Bencana	o Jumlah rekomendasi di bidang penanganan bencana	%	93,50	402.450.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
			Aksesibilitas kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan yang ditindak lanjuti	%	97,36	300.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
			Program : Dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	%	90,54	10.000.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
			Kegiatan : Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Persentase dukungan layanan administrasi dalam penyediaan hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan	%	90,54	10.000.000.000	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur

TABEL 6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

TABEL T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	2020	RP(000,00)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.0.03.01	Program : Pelayanan Kesekretariatan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ○ Persentase indikator program Biro Administrasi Kesejahteraan sosial yang tercapai ○ Persentase realisasi anggaran biro Administrasi Kesejahteraan Sosial ○ Indeks profesionalisme ASN Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 	%		5.955.253,30	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
					%			Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
								Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.01.001	Kegiatan : Penyusunan, dokumen perencanaan dan anggaran Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah dokumen perencanaan ○ Jumlah dokumen pelaporan/evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah 	Dokumen		57.025,00	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
					Dokumen			Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.01.002	Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pelaksanaan sistem informasi data	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah update database yang menunjang pelayanan administrasi di Biro Adm. Kesejahteraan Sosial 	database		117.434,00	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.01.003	Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah dokumen 	Dokumen		1.928.378,00	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur

		3.0.03.01.004	Ketatausahaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian ○ Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan ○ Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor ○ Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 	Dokumen		3.852.416,30	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
					Dokumen			Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
					%			Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.32	Program : Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	○ Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti	%		8.419.813,360	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.32.001	Kegiatan : Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang kerohanian	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta monitoring dan evaluasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama ○ Indeks Kepuasan peserta kegiatan hari besar keagamaan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan 	Dokumen		5.264.807,600	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
								Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.32.002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang kelembagaan	○ Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta monitoring dan evaluasi di bidang kelembagaan agama	Dokumen		2.234.581,800	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.32.003	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana	○ Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan	Dokumen		920.425,00	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur

			o Jumlah Guru Madin yang mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik	OHK			Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.33	Program : layanan administrasi Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	o Persentase rumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ditindaklanjuti	%	4.358.814,36	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.33.001	Kegiatan : - Pelaksanaan dan Rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	o Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan	Dokumen	917.425,46	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
				o Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan peringatan hari besar			Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.33.002	Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	o Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang kepemudaan dan olahraga	Dokumen	2.345.532,800	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
				o Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional			Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.33.003	Pelaksanaan dan rumusan Kebijakan di Bidang Kebudayaan dan pariwisata	o Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang kebudayaan dan pariwisata	Dokumen	1.095.856,10	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
				o Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan peringatan hari besar Nasional			Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.0.03.34	Program : Layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	o Persentase Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti	%	5.789.153,732	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur

		3.03.31.001	<u>Kegiatan :</u> Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak o Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 	Dokumen			2.571.884,732	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.31.002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak o Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 	Dokumen			3.217.269,00	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.35	<u>Program :</u> • layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	o Persentase Kebijakan di Bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti	%			1.817.550,208	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.35.001	<u>Kegiatan :</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang penanganan sosial	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganan sosial o Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 	Dokumen			1.036.503,00	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.35.002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana	o Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana	Dokumen			349.257,208	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur

				<ul style="list-style-type: none"> ○ Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 				Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.35.003	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana ○ Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 	Dokumen		431.790,00	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
								Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.37	<u>Program :</u> Dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ○ Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti 	%		5.826.278,681	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur
		3.03.37.001	<u>Kegiatan :</u> Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Persentase dukungan layanan administrasi dalam penyaluran hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan 	%		5.826.278,681	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jawa Timur

TABEL 6.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021- 2024
TABEL 6.3 T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (kondisi awal 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	target	Rp (ribuan)	target	Rp (ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	
Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Menumbuhkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Tujuan : Indeks Kepedulian Sosial Sasaran : Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 2 Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro	4.01.04	<u>Program</u> : Kesejahteraan Rakyat	1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	76,98	87	1.308.075.318.700	88	2.000.247.369.791	89	2.001.386.310.216	90	2.001.877.571.333		Biro Kesejahteraan Rakyat	Jtm	
							87		88		89		90					

					2. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	87		88		89		90					
					3. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	80		82		83		85					
					4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	80		82		83		85					
					5. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	80		82		83		85					
					6. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar												
		4.01.04.1.01															
				Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan	87	347.002.469.546	88	505.490.875.683	90	505.899.191.542	92	506.075.311.118				

				yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual														
				2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual	87		88		90			92						
				3. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang bina kehidupan spiritual	87		88		90			92						
				4. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual	2		2		3			3						
				5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual	2		2		3			3						
				6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina kehidupan spiritual	2		3		3			3						
				7. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap	85		87		89			90						

				dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual														
				8. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang kelembagaan bina spiritual	85		87		89		90							
				9. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur	85		87		89		90							
	4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan : - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data diolah di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan • Prosentase kebijakan yang dianalisa di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan • Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana 	90	331.932.435.143	92	244.486.871.677	94	244.525.858.167	96	244.542.674.276							
					90		92		94		96							
					93		95		96		97							

			4.01. 04.1. 01.02	- Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	spiritual yang ditindaklanjuti														
					<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah dibidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama • Prosentase kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur yang terlaksana • Prosentase data yang diolah dibidang lembaga bina spiritual • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang lembaga bina spiritual • Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah dibidang Kelembagaan bina spiritual yang ditindaklanjuti 	90	15.070.034.403	92	261.004.004.006	94	261.373.333.375	96	261.532.636.842						
						90		92		94		96							
						100		100		100		100							
						90		92		94		96							
						90		92		94		96							
						93		95		96		97							
			4.01. 04.1. 02	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan 2. Prosentase fasilitasi	87	891.146.590.595	88	502.467.610.373	90	502.755.461.211	92	502.879.620.246						
						87		88		90		92							

			rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan															
		4.01.04.1.02.01	3. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang social	87		88		90		92								
			4. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan	2		2		3		3								
			5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan	2		2		3		3								
			6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang social	2		2		3		3								
			7. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang pendidikan	85		87		89		90								
		4.01.04.1.02.02	8. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang social	85		87		89		90								
			9. Indeks kepuasan	85		87		89		90								

				<p>Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah di bidang sosial • Prosentase kebijakan yang dianalisa di bidang sosial • Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang sosial yang terlaksana • Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sosial yang ditindaklanjuti 		90	133.925.738.841	92	249.337.428.367	94	249.413.426.016	96	249.446.206.211				
						90		92		94		96					
						100		100		100		100					
						93		95		96		97					
			4.0 1.0 4.1 .03	<p>kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata 2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja 		87	69.926.258.559	88	992.288.883.371	90	992.731.657.463	92	992.922.639.969				
			4.0 1.0			87		88		89		90					
						2		2		3		3					

				anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja		85		87		89		90					
				7. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata		85		87		87		90					
				8. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja													
				<u>Sub Kegiatan :</u> • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan	• Prosentase data yang diolah di bidang Kepemudaan, Olahraga,	90	56.295.305.890	92	492.510.746.706	94	492.659.459.801	96	492.723.604.475				

				n Rakyat Bidang Kepemudaan , Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kebudayaan, dan Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Prosentase kegiatan peringatan Hari Besar Nasional di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang terlaksana • Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang ditindaklanjuti 		90		92		94		96					
							100		100		100		100					
							93		95		94		96					
				• Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan	• Prosentase data yang diolah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja		90	13.630.952.669	92	499.778.136.665	94	500.072.197.662	96	500.199.035.494				

				Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 	90		92		94		96					
					<ul style="list-style-type: none"> Prosentase kegiatan peringatan Hari Besar Nasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang terlaksana 	100		100		100		100					
					<ul style="list-style-type: none"> Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 	93		95		96		97					

				Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang ditindaklanjuti														
			3.0 .03 .01	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase indikator program yang tercapai Persentase realisasi anggaran Indeks profesionalisme ASN 	80	20.728.690.766	82	23.687.423.893	85	24.105.228.466	87	24.222.346.487					
			XX X0 11 01	Kegiatan : • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai 	80	104.633.000	82	103.573.000	85	105.756.879	87	106.651.317					
			XX X01 101 01	Sub kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah 	5	14.955.000	5	17.516.500	5	17.885.843	5	18.037.112					
			XXX 011 010 2	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen 	1	9.155.000	1	3.915.000	1	3.997.549	1	4.031.359					
			XXX 011 010 3	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen RKA Perubahan 	1	10.155.000	1	2.730.000	1	2.787.563	1	2.811.139					
			XX X0 11 01 04	• Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen DPA 	1	10.155.000	1	4.945.000	1	5.049.267	1	5.091.971					

XXX 011 010 5	• Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	• Jumlah dokumen DPA Perubahan		1	9.655.000	1	4.842.000	1	4.944.096	1	4.985.910			
XXX 011 010 6	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Jumlah dokumen capaian kinerja		4	26.908.000	4	11.132.500	4	11.367.233	4	11.463.372			
XXX 011 010 7	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Jumlah kegiatan evaluasi kinerja		2	23.650.000	2	58.492.000	2	59.725.328	2	60.230.454			
XX X0 11 02	<u>Kegiatan:</u> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat		95	18.288.394.000	96	19.014.091.050	97	19.321.229.982	97	19.586.972.983			
XX X0 11 02 01	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan		12	14.826.327.000	12	15.404.821.000	12	15.635.892.000	12	15.870.431.000			
XX X0 11 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	3.402.992.000	12	3.575.062.750	12	3.650.444.407	12	3.681.318.005			
XX X0 11 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan		12	8.900.000	12	6.546.800	12	6.648.842	12	6.741.379			
XX X0 11 02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi Biro		12	10.050.000	12	4.945.000	12	5.049.267	12	5.091.971			
XX X0 11 05 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD		12	10.100.000	12	6.232.500	12	6.363.915	12	6.417.738			

	XX X0 11 02 06	engelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP		2	9.350.000	2	5.975.000	2	6.100.985	2	6.152.584		
	XX X0 11 02 07	ordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD	• Jumlah laporan keuangan		12	15.625.00 0	12	6.232.500	12	6.363.915	12	6.417.738		
	XX X0 11 02 08	enyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	• Jumlah laporan prognosis		1	5.050.000	1	4.275.500	1	4.365.651	1	4.402.573		
	XX X0 11 05	egiatan: administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang memenuhi waktu kerja efektif 75.000 menit sesuai tugas pokok dan fungsi		100	379.712.500	100	393.793.000	100	402.096.286	100	405.497.013		
	XX X0 11 05 01	eningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	• jumlah laporan presensi pegawai		12	3.285.000	12	16.359.000	12	16.703.936	12	16.845.210		
	XX X0 11 05 03	endataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	• Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian		12	3.285.000	12	19.365.000	12	19.773.319	12	19.940.552		
	XX X0 11 05 04	ordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	• Jumlah laporan data pegawai		12	6.420.000	12	2.925.000	12	2.986.675	12	3.011.935		
	XX X0 11 05 05	onitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP		12	54.270.00 0	12	38.265.000	12	39.071.833	12	39.402.283		
	XX X0 11 05 09	endidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan yang meningkatkan kompetensi Pegawai dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi		2	312.452.5 00	2	316.879.000	2	323.560.523	2	326.297.033		
	XX	egiatan: administrasi	Indeks kepuasan		85	805.886.748	87	1.651.971.133	88	1.686.803.618	90	1.701.069.743		

	X0 11 06	Umum Perangkat Daerah	pegawai terhadap pelayanan administrasi umum												
	XX X0 11 06 01	<u>Jb kegiatan:</u> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan		1	20.933.000	1	20.361.873	1	20.791.211	1	20.967.053			
	XX X0 11 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan		1	204.452.716	1	248.171.320	1	253.404.114	1	255.547.276			
	XX X0 11 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	• jumlah paket pengadaan		1	257.097.000	1	677.993.995	1	692.289.775	1	698.144.809			
	XX X0 11 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	• jumlah paket pengadaan		1	192.595.494	1	499.573.070	1	510.106.772	1	514.420.995			
	XX X0 11 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• jumlah paket pengadaan		1	21.600.000	1	41.566.680	1	42.443.130	1	42.802.093			
	XX X0 11 06 08	fasilitasi Kunjungan Tamu	• jumlah paket pengadaan		1	31.080.000	1	121.580.000	1	124.143.564	1	125.193.507			
	XX X0 11 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	• Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital		3	14.550.000	3	5.498.195	3	5.614.127	3	5.661.608			
	XX X0 11 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	• Jumlah Sistem Informasi yang didukung		4	63.578.538	4	37.226.000	4	38.010.925	4	38.332.402			
	XX X0 11 07	<u>Kegiatan:</u> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	jumlah paket pengadaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		2	-	2	177.751.859	2	181.499.829	2	183.034.863			

		Daerah	Pemerintah Daerah												
	XX X0 11 07 05	Sub kegiatan: Pengadaan Mebel	• jumlah paket pengadaan	2	-	2	-	2	-	2	-				
	XX X0 11 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	• Jumlah paket pengadaan	2	-	2	-	2	-	2	-				
	XX X0 11 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• Jumlah paket pengadaan	2	-	2	177.751.859	2	181.499.829	2	183.034.863				
	XX X0 11 08	Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	• jumlah jasa yang menunjang pelayanan ketatausahaa n	4	861.000.000	4	1.411.881.851	4	1.453.778.468	4	1.460.023.040				
	XX X0 11 08 01	Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Jumlah pengiriman dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.189.769	1	9.267.491				
	XX X0 11 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	684.000.000	1	761.040.000	1	777.086.839	1	783.659.043				
	XX X0 11 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah jasa	1	10.000.000	1	6.000.000	1	6.126.512	1	6.178.327				
	XX X0 11 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	• Jumlah jasa • Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional bantuan hibah dan bantuan sosial	1 92	158.000.000	1 95	641.841.851	1 96	655.375.348	1 96	660.918.179				
	XX X0 11 09	Sub kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	• Jumlah jasa untuk pemeliharaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	289.064.581	4	934.362.000	4	954.063.404	4	962.132.386				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ini susunan Indikator Kinerja Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7.1 T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Program	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	-	-	85	87	89	90	90
2.	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	-	-	85	87	89	90	90
3.	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	-	-	27	30	32	35	35

Tabel 7.2
Tabel Nawa Bhakti Satya Perangkat Daerah

No.	NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran			
						2021	2022	2023	2024
1.	BHAKTI 5 : JATIM BERKAH "Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas"	Tunjangan Kehormatan Imam Masjid	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	22.000.000.000			
		Beasiswa S1 bagi guru madin	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	1.625.000.000			
		Beasiswa S1 Ma'had Aly	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	7.200.000.000			
		Beasiswa S2 bagi guru madrasah Madin	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	4.250.000.000			
		Tunjangan Kehormatan Haffidz Haffidzoh	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	6.400.000.000			
		Beasiswa Universitas Al Azhar Kairo	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	8.000.000.000			

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat dalam kurun waktu tahun 2019–2024 untuk menunjang pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang dijelaskan dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Keberhasilan Renstra ini tergantung pada pemahaman kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak baik secara internal di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat maupun dukungan secara eksternal para stakeholders dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata dalam pengembangan SDM bagi seluruh pejabat maupun staf di Biro Kesejahteraan Rakyat. Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Semoga isi dari Renstra yang kami susun ini, dapat bermanfaat untuk pengembangan Biro Kesejahteraan Rakyat dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024. Sekian dan terima kasih.

Surabaya,

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



Dr. HUDIYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010